

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 8	NOMOR: 1	HALAMAN: 11-16	ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v8i1.15961
---------------------------	-----------	----------	----------------	--

PENGANGGULANGAN BENCANA DI MASYARAKAT DESA STUDI DI DESA CIPACING, DESA CILELES, DAN DESA CIKERUH KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG

Muhammad Fedryansyah¹, Ramadhan Pancasilawan², Ishartono³

1. Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
m.fedryansyah@unpad.ac.id
2. Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
ramadhanpancasilawan@unpad.ac.id
3. Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
ishartono@unpad.ac.id

ABSTRAK

Wilayah Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana alam di Kabupaten Sumedang. Beberapa tahun terakhir, Kecamatan Jatinangor telah mengalami beragam bencana terutama banjir dan longsor. Penanggulangan terhadap dampak bencana, baik di pencegahan maupun penanganan, telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, masyarakat di desa-desa di Jatinangor juga terlibat dalam penanggulangan bencana, terutama di tahapan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh masyarakat desa di Kecamatan Jatinangor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan analisis berdasarkan interpretasi dari data primer maupun sekunder. Adapun lokasi yang dipilih adalah Desa Cipacing, Desa Cileles, dan Desa Cikeruh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari tiga tahapan penanggulangan bencana, yaitu pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana, dapat diketahui adanya peran yang dilakukan oleh masyarakat desa. Meskipun demikian, masyarakat masih belum memahami bahwa aktifitas yang mereka lakukan tersebut merupakan bentuk dari penanggulangan bencana. Dengan demikian, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dapat merancang program mengenai penguatan kapasitas masyarakat desa dalam penanggulangan bencana, baik di tahap pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana.

Kata kunci : siklus bencana, penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

ABSTRACT

Jatinangor is one of the areas that have potential natural disasters in Sumedang Regency. In recent years, Jatinangor has experienced various disasters, especially floods and landslides. The prevention of disaster impacts, both in prevention and management, has been undertaken by local governments. In addition, villagers in Jatinangor are also involved in disaster management, especially in pre-disaster, disaster, and post-disaster stages. This study aims to

describe disaster management conducted by villagers in Jatinangor. The method used in this research is qualitative by doing analysis based on interpretation from primary and secondary data. The selected locations are Cipacing Village, Cileles Village, and Cikeruh Village. The results of this study indicate that from three stages of disaster management, ie pre-disaster, during disaster, and post-disaster, it can be seen the role performed by the village community. Nevertheless, people still do not understand that the activities they do are a form of disaster management. Thus, the local government of Sumedang Regency can design a program on strengthening the capacity of village communities in disaster management, both in the pre-disaster stage, during the disaster, and after the disaster.

Key words : disaster cycle, community based disaster management.

PENDAHULUAN

Bencana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Ben-cana memiliki pengertian yaitu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan ma-syarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Menurut undang-undang tersebut, bencana dibagi menjadi tiga jenis yakni; 1). Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung api, badai dan kekeringan; 2). Bencana sosial karena ulah manusia seperti konflik, perang, serangan teroris, kegagalan teknologi dan hama pe-nyakit; dan 3) Bencana campuran alam dab manusia yaitu banjir, kebakaran hutan dan kekurangan pangan (IDEP, 2007).

Salah satu provinsi yang paling rentan meng-alami bencana di Indonesia adalah provinsi Jawa Barat. Hampir setiap daerah di Jawa Barat memiliki potensi terjadinya bencana, dari 26 kabupaten/kota 19 di antaranya termasuk ketegori zona merah, yaitu paling tinggi tingkat rawan bencana alamnya (BNPB, 2016). Berdasarkan data yang dihimpun BNPB pada dari tahun 2011-2015, bencana yang terjadi di Jawa Barat terdiri dari tanah longsor dengan 678 kejadian, banjir 501 kejadian, puting beliung 479 kejadian, kebakaran 79 kejadian, kekeringan 74 kejadian, banjir dan tanah long-sor 28

kejadian dan gempa bumi 17 kejadian (BNPB, 2016). Salah wilayah di Provinsi Jawa Barat yang termasuk ke dalam zona merah adalah Kabupaten Sumedang. Bencana yang sering terjadi di Kabupaten Sumedang adalah bencana banjir. Dimana, pada tahun 2016 sebanyak delapan kecamatan di kabupaten ini mengalami bencana banjir (BPBD Jawa Barat, 2016). Serangkaian kegiatan baik sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan me-mulihkan diri dari dampak bencana disebut sebagai penanggulangan bencana. Penang-gulungan bencana saat ini telah mengalami perkembangan paradigma dari responsif me-nuju preventif. Penanggulangan bencana se-cara konvensional berubah menjadi holistik dari menangani dampak menjadi mengelola resiko yang semula hanya urusan pemerintah berubah menjadi hubungan sinergis bekerja-sama dengan masyarakat untuk melakukan pencegahan bencana. Secara umum kegiatan-kegiatan dalam penanggulangan bencana meliputi: pencegahan, pengurangan dampak bahaya, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pe-mulihan dan pembangunan yang mengurangi resiko bencana (IDEP, 2007). Pendapat lainnya menyebutkan bahwa siklus manajemen bencana dapat dibagi menjadi empat tahapan, yaitu tahap kesiapsiagaan, tahap pra bencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pasca bencana (BNPB,2011).

Terkait dengan manajemen bencana, selama ini telah dilakukan beberapa penelitian yang membahas tentang manajemen bencana tersebut. Antara lain Tukino (2013); Nisa (2014); serta Ristrini, Rukmini, dan Oktarina (2012).

Dalam penelitian-penelitian mengenai penang-gulangan bencana berbasis masyarakat dapat ditarik benang merah bahwa penelitian-penelitian yang ada hanya dilakukan di masyarakat desa yang masih tradisional. Kajian mengenai penanggulangan bencana di masyarakat urban atau perkotaan masih sangat terbatas.

Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan mengenai penanggulangan bencana yang dilakukan oleh masyarakat desa, terutama masyarakat desa dengan karakteristik urban.

METODE

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji penanggulangan bencana yang dilakukan oleh masyarakat desa di Kecamatan Jatinangor, dengan mengambil kasus di Desa Cipacing, Desa Cileles, dan Desa Cikeruh. Ketiga lokasi ini dipilih sebagai gambaran tiga karakteristik wilayah di Kecamatan Jatinangor, yaitu wilayah pegunungan (Desa Cileles), wilayah pemukiman (Desa Cikeruh), dan wilayah industri (Desa Cipacing). Untuk mendapatkan gambaran mengenai penang-gulangan bencana pada tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif.

Pengumpulan data dalam kegiatan ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait dengan kebijakan dan program penang-gulung-an bencana yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. Sedangkan data primer diarahkan untuk menggali informasi secara

langsung di lapangan terkait dengan penang-gulangan bencana, yang dilakukan dengan cara menggunakan wawancara mendalam serta melakukan Focus Group Discussion. Penelitian ini melibatkan 20 orang informan yang dipandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai penanggulangan bencana di tiga desa yang menjadi kasus dalam penelitian ini. Informan tersebut terdiri dari aparat pemerintahan desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat awam yang ada di setiap desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Pra Bencana

Kegiatan pra bencana mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini. Banjir merupakan salah satu bencana yang rutin dialami oleh masyarakat. Masyarakat juga berpandangan bahwa bencana banjir di wilayah mereka, terjadi karena akibat dari permasalahan tata ruang dan sampah yang tidak kunjung usai di wilayah Jatinangor. Dari hasil temuan lapangan dapat diketahui bahwa terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat yang ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana banjir di wilayah mereka. Upaya pencegahan tersebut dilakukan dengan cara mendorong masyarakat untuk kerja bakti membersihkan lingkungan dan sampah yang menyumbat saluran sungai Cikeruh. Kegiatan tersebut dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat, namun belum melibatkan pihak-pihak lain seperti perguruan tinggi (melalui mahasiswa yang tinggal di wilayah desa mereka).

Dalam tahap pra bencana ini, juga ditemukan adanya nilai-nilai lokal yang masih diterapkan di masyarakat. Nilai-nilai lokal tersebut muncul pada sistem peringatan dini yang ada di masyarakat. Masyarakat masih menggunakan *kentongan* sebagai bentuk komunikasi ketika terjadi bencana di wilayah mereka. Sistem peringatan ini dapat ditemukan

pada pos-pos siskamling yang ada di tiap desa.

Namun, dari hasil penelitian lapangan juga dapat diketahui bahwa masyarakat desa belum memiliki pengetahuan dalam persiapan menghadapi bencana. Sampai dengan saat ini belum terdapat wilayah atau kawasan yang bisa dijadikan sebagai zona aman ketika terjadi bencana. Masyarakat selama ini hanya menggunakan tempat beribadah sebagai *shelter* atau tempat berlindung bagi korban yang terkena dampak bencana. Selain sarana ibadah tersebut, masyarakat juga umumnya mengungsi atau berlindung di rumah kerabat-nya masing-masing.

Selain itu, dari hasil penelitian lapangan juga diketahui bahwa desa-desa yang menjadi lokasi penelitian masih belum memiliki sistem manajemen informasi yang dapat mendukung mitigasi bencana. Sistem tersebut seperti peta rawan bencana dan peta jalur evakuasi sebagai titik berkumpul korban terdampak. Begitupula dengan pengetahuan masyarakat mengenai tahap pra bencana yang masih sangat terbatas. Oleh sebab itu tindakan yang dilakukan di tahap pra bencana masih belum bersifat kolektif dan secara signifikan dapat mengurangi dampak dari bencana.

Dengan demikian, kegiatan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana yang dilakukan oleh masyarakat desa baru sebatas pencegahan dan peringatan dini. Tidak ditemukan adanya kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan yang dilakukan oleh masyarakat desa di lokasi penelitian ini. Di tahap pra bencana ini juga ditemukan adanya pemanfaatan nilai lokal dalam sistem peringatan dini terhadap bencana di masyarakat. Nilai lokal tersebut diwujudkan dalam penggunaan *kentongan* yang ada di pos kamling setiap RW.

2. Tahap Saat Bencana

Kegiatan saat terjadi bencana seharusnya mencakup kegiatan tanggap

darurat untuk meringankan korban yang terdampak, pe-nyaluran bantuan, pengungsian, dan *search and rescue*. Dari hasil temuan lapangan dapat diketahui bahwa masyarakat desa di Kecamatan Jatinangor belum memiliki penge-tahuan untuk menghadapi bencana secara kolektif. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih beranggapan bahwa bencana merupa-kan sesuatu yang lumrah terjadi setiap tahunnya, terutama bencana banjir. Oleh sebab itu masyarakat tidak memiliki persiapan apapun dalam menghadapi bencana. Tindakan yang dilakukan masyarakat saat terjadi bencana hanya terbatas pada menyelamatkan diri serta memindahkan barang berharga ke lokasi yang lebih aman. Sampai dengan saat ini belum terdapat jalur evakuasi ketika bencana terjadi. Ketiadaan jalur evakuasi dapat mengakibatkan potensi korban yang semakin meningkat karena belum adanya manajemen informasi saat terjadi bencana.

Selain itu, masyarakat juga belum terpikir mengenai apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana di wilayah mereka. Begitupula dengan aparat pemerintah desa, dimana pemerintah desa belum menentukan wilayah mana yang aman untuk pengungsian maupun tempat berkumpul ketika terjadi bencana. Wilayah desa yang cukup luas dengan karakteristik perbukitan juga menyulitkan bagi aparat desa untuk menentukan daerah yang aman. Meskipun demikian, dari hasil temuan lapangan juga dapat diketahui bahwa masyarakat desa pada umumnya masih menunjukkan nilai-nilai kekeluargaan. Nilai-nilai tersebut seperti saling bergotong royong atau saling membantu. Seperti misalnya saling memberikan bantuan tempat berlindung atau tempat pengungsian bagi keluarga maupun kerabat mereka yang menjadi korban.

Dengan demikian, dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam tahap saat bencana seperti kegiatan tanggap darurat untuk meringankan korban terdampak; penyaluran bantuan bagi korban;

pengungsian; serta *search and rescue*; yang sudah dilakukan oleh masyarakat desa adalah bantuan pengungsian yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan. Belum terdapat aktifitas seperti tanggap darurat, penyaluran bantuan, maupun *search and rescue* yang dilakukan oleh masyarakat.

3. Tahap Pasca Bencana

Kegiatan pasca bencana merupakan kegiatan yang mencakup pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Dari hasil temuan lapangan diketahui bahwa kegiatan pemulihan yang dilakukan masyarakat adalah membersihkan lingkungan mereka dari sisa-sisa banjir seperti sampah dan lumpur yang berceceran.

Selain itu, hasil temuan lapangan juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak pernah melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana terjadi.

Terkait dengan kegiatan yang dilakukan pada tahap pasca bencana ini, masyarakat desa pada umumnya belum memiliki pengetahuan mengenai apa yang harus mereka lakukan. Keterbatasan tersebut disebabkan minimnya informasi yang mereka peroleh mengenai penanggulangan bencana. Masyarakat hanya memahami bahwa apabila setelah bencana terjadi maka mereka akan bergotong-royong membangun kembali wilayah yang terkena bencana. Hal tersebut juga terbatas pada kegiatan pembersihan lingkungan dari sisa-sisa bencana.

Selama ini para korban terdampak bencana, dan masyarakat desa pada umumnya, juga belum pernah diberikan pemahaman mengenai rehabilitasi seperti *trauma therapy*, dan lainnya. Hal ini dikarenakan adanya pemahaman masyarakat bahwa bencana merupakan takdir, sehingga para korban maupun masyarakat pada umumnya, harus sabar menerima kejadian bencana tersebut.

Dengan demikian, pada tahap pasca bencana ini hanya terdapat kegiatan

pemulihan (bersih lingkungan) yang dilakukan oleh masyarakat. Belum ditemukan kegiatan rehabilitasi bagi korban bencana, serta belum ada kegiatan rekonstruksi yang dilakukan oleh masyarakat.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam siklus penanggulangan bencana, yaitu tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana, masih terdapat beberapa kelemahan yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun kelemahan tersebut disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat mengenai penang-gulangan bencana.

Meskipun demikian, sudah terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kegiatan tersebut antara lain pencegahan dan peringatan dini pada tahap pra bencana. Selanjutnya kegiatan bantuan pengungsian pada tahap saat bencana. Kemudian kegiatan pemulihan pada tahap pasca bencana.

Di sisi lain, meskipun pengetahuan masyarakat mengenai penanggulangan bencana masih terbatas, masyarakat masih memegang nilai-nilai lokal. Nilai-nilai lokal tersebut mereka gunakan untuk menghadapi bencana. Adapun nilai-nilai lokal tersebut seperti pemanfaatan *kentongan* sebagai sistem peringatan dini ketika bencana terjadi, serta semangat kekeluargaan dan gotong-royong dalam membantu para korban yang terdampak bencana di wilayah mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- BNPB. 2011, Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Erupsi Gunung Merapi Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah Tahun 2011- 2013, Jakarta : BNPB
- IDEP, Yayasan. 2007. Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 8	NOMOR: 1	HALAMAN: 11-16	ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v8i1.15961
---------------------------	-----------	----------	----------------	--

Masyarakat. Yayasan IDEP.
Jakarta: Penerbit Erlangga

Nisa, Fachricatun. 2014. Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Jombang. JKMP. Vol. 2. No. 2. September 2014.

Ristrini. Rukmini. Oktarina. 2012. Analisis Implementasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat. Buletin Penelitian Kesehatan. Vol. 15. No. 1. 2012.

Tukino. 2013. Pekerjaan Sosial dalam Setting Kebencanaan. Share :

Social Work Journal Vol 3. No. 2. September 2013.

UNDP. 1992. Tinjauan Umum Manajemen Bencana: Program Pelatihan Manajemen Bencana

Sumber Lain :

UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
<http://dibi.bnpb.go.id/profil-wilayah/32/jawa-barat>
<http://bpbd.jabarprov.go.id/index.php/component/k2/item/31-banjir-sumedang-16-2-2016>